

BAB III

ANALISIS KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN AFGHANISTAN MELALUI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME BERBASIS NORMA

Gejolak politik domestik Afghanistan telah membawa banyak konsekuensi bagi masyarakat disana. Taliban tidak hanya mengubah sistem negara tetapi juga mengubah sistem sosial. Dampak besar yang ditimbulkan oleh pengambilalihan kekuasaan ini terjadi pada kaum anak dan perempuan. Mereka menjadi komunitas yang paling rentan. Sebab, pemerintah Taliban sendiri menekan hak-hak perempuan serta mengeluarkan sederet aturan yang irasional untuk mengatur kehidupan sosial perempuan Afghanistan.

Pada bab dua, penulis telah memaparkan sejumlah bukti penurunan kualitas hidup perempuan di negara tersebut. Mulai dari penurunan tingkat kualitas pendidikan pada perempuan, penurunan kesehatan, bahkan sampai aturan terhadap pakaian kaum perempuan. Taliban sangat memarginalisasi kaum perempuan di negaranya sendiri. Kondisi ini tentu saja menyentuh pemerintah RI untuk memberikan dukungan serta bantuan terhadap Afghanistan. Kegagalan pemerintah Taliban untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki membuat dunia turut bergerak untuk mengambil alih tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan perempuan di negeri tersebut. Pemerintah Indonesia tidak hanya sebagai pengikut, tetapi turut pro-aktif memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan dengan menggandeng sejumlah aktor dunia. Tindakan pemerintah kita ini patut diapresiasi sekaligus menjadi sebuah pertanyaan sebagaimana yang penulis ungkapkan dalam rumusan masalah di bab pertama.

Atas dasar tersebut, bab tiga dirancang untuk menjelaskan alasan Pemerintah RI berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pada sub-pertama, penulis akan menjelaskan kedudukan kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Sub-bab kedua akan membahas terkait langkah-langkah konkrit Pemerintah

Indonesia dalam isu pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Sub-bab terakhir membahas terkait tiga norma yang penulis anggap sangat berpengaruh terhadap komitmen Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Ketiga norma tersebut adalah menjaga perdamaian, kesetaraan gender, serta gotong royong.

1.1 Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Akhir-akhir ini, Indonesia mulai mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender secara masif. Tidak hanya di dalam lingkup pemerintahan, tetapi juga dari masyarakat sendiri. Jika ditarik ke belakang, promosi kesetaraan gender sebenarnya sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Namun, dalam kebijakan pemerintah Indonesia sendiri, isu ini mulai naik sejak tahun 1990-an. Tepatnya ketika pemerintah menandatangani *Beijing Declaration and Platform for Action* yang mengatur negara untuk memberika akses politik kepada perempuan (Prajuli & Yustikaningrum, 2018). Dalam artian lain, perempuan didorong untuk dapat memiliki hak politik secara utuh sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Inilah awal mula kesetaraan gender menjadi bagian yang sangat penting dalam tubuh pemerintah Indonesia.

Kesetaraan gender tidak hanya tentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial sehari-hari. Lebih daripada itu, Indonesia mulai mengarusutamakan kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri. Penerapan prinsip pengarusutamaan gender sangat dipengaruhi oleh dilantiknya menteri luar negeri perempuan pertama Indonesia, yaitu Retno Marsudi (Firdharizki, 2021). Bahkan Menteri Luar Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat komitmen tersebut. Tujuan Permenlu ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). Sehingga, penerapan prinsip kesetaraan gender dapat lebih terpantau dan lebih efektif, baik bagi Indonesia maupun bagi negara tujuan. Penerapan prinsip kesetaraan gender dapat dilihat

dari beberapa agenda internasional. Salah satunya komitmen Indonesia pada *Women, Peace, and Security (WPS) Agenda* yang diadopsi pada tahun 2000 silam oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini direalisasikan dengan mengirim personel TNI perempuan ke daerah-daerah rawan konflik, terutama di wilayah Timur Tengah. Personel perempuan diterjunkan dengan tujuan mengayomi kaum perempuan di negara-negara penerima. Sebab, perempuan di daerah-daerah tersebut masih sangat rawan terkena kekerasan dan termarginalisasi. Oleh sebab itu, peran personel perempuan dalam pasukan perdamaian PBB sangat diperlukan.

Hal ini juga mendorong Indonesia untuk membantu pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Afghanistan menjadi salah satu mitra dari penerapan kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Secara demografi, populasi perempuan di Afghanistan berjumlah 49% dari total populasi (Rachman, 2023). Dengan fakta tersebut, pemberdayaan perempuan di Afghanistan mutlak diperlukan dalam proses pemulihan kondisi Afghanistan dalam semua aspek di negara yang telah mengalami konflik dan perang semenjak 1979. Besarnya populasi perempuan disana dapat memengaruhi kondisi negara tersebut. Semakin berdaya kaum perempuan maka semakin banyak hal yang dapat dilakukan oleh mereka. Sehingga, para perempuan dapat memiliki kemajuan kualitas hidup dan turut berkontribusi pada pembangunan negara. Jika pemberdayaan tidak dilakukan, maka Afghanistan tidak dapat keluar dari kondisi krisis seperti sekarang ini.

Sejak Taliban kembali merebut pemerintahan di Afghanistan, hak-hak kaum perempuan telah banyak direduksi bahkan dihilangkan. Perempuan memiliki keterbatasan atau bahkan kehilangan untuk mengakses pendidikan, kehidupan sosial dan politik, kesehatan, serta ekonomi sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya. Oleh sebab itu, Indonesia turut serta dalam pemberdayaan perempuan Afghanistan terutama pada bidang sosial budaya. Harapannya, perempuan di negeri tersebut dapat kembali merasakan hak-hak mereka sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki.

Selain Indonesia, banyak negara yang telah menerapkan norma ini dalam kebijakan luar negerinya. Lokalisasi norma-norma internasional sangat perlu dilakukan supaya norma tersebut dapat bermanfaat. Norma kesetaraan gender yang diartikulasikan oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, pada hakikatnya bersifat tidak jelas, abstrak, dan umum. Gagasan abstrak ini dapat 'diisi', dipahami, diinterpretasikan dan ditafsir ulang ketika norma-norma tersebut ditransfer dan diubah oleh konteks lokal (Kardam, 2004, hal. 105). Oleh sebab itu, Indonesia tidak seorang diri dalam misi pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pemerintah Indonesia mengajak warga dunia untuk bergotong royong dalam misi tersebut mengingat banyak negara yang telah melokalisasi norma kesetaraan gender tersebut. Misalnya saja dalam pertemuan tingkat tinggi PBB di New York pada bulan September 2023. Indonesia bersama Kanada dan Irlandia mengadvokasi solidaritas perempuan Afghanistan pada forum tersebut (Saputra, 2023). Dengan begitu, tugas untuk menerapkan kebijakan berbasis kesetaraan gender di Afghanistan dapat lebih ringan untuk dikerjakan.

1.2 Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan oleh Pemerintah Indonesia

Indonesia turut berkomitmen dalam memberdayakan kaum perempuan dan anak di Afghanistan. Kampanye terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya diserukan dalam berbagai forum internasional. Pemerintah pun melakukan langkah konkrit yang dampaknya dapat dirasakan oleh rakyat Afghanistan sendiri. Marginalisasi kaum perempuan dan anak harus segera ditangani untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan negara Afghanistan.

Untuk memberdayakan komunitas perempuan dan anak, pemerintah kita masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Afghanistan melalui bidang sosial budaya. Indonesia secara langsung berkontribusi bahkan sedikit-banyak telah membantu memulihkan kondisi sosial di negara tersebut. Berikut ini kebijakan luar negeri Indonesia yang menyoar beberapa sektor sosial budaya di Afghanistan, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

1.2.1 Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu sub-sektor yang menjadi konsentrasi Indonesia dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Indonesia telah banyak melakukan diplomasi dan negosiasi untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan dan anak di Afghanistan. Hal ini dibuktikan dengan cara menyediakan program pengembangan kapasitas bagi 100 warga negara Afghanistan, yang mana 12 diantaranya merupakan perempuan (Rachman, 2023). Di samping itu, Indonesia juga memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Tidak hanya menasar pada pendidikan non-formal, Indonesia juga berupaya memperjuangkan pendidikan formal bagi mereka.

Upaya pemberdayaan perempuan juga dilakukan oleh Indonesia dengan mengkait negara mitra kerja sama. Contohnya seperti Qatar. Pemerintah Indonesia dan Qatar sudah melaksanakan *The International Conference on Afghan Women's Education* (ICAWE). Konferensi ini dilaksanakan di Bali pada Desember 2022. Pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut sebagai "*The Bali Message*" yang mengandung 10 poin. Dirangkum dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2022), 10 poin dalam ICAWE adalah sebagai berikut:

- (1) Mendukung setiap inisiatif dan upaya untuk menciptakan lingkungan kondusif untuk mewujudkan dialog intra-Afghanistan;
- (2) Memastikan partisipasi penuh dan setara untuk perempuan dan anak perempuan karena mereka adalah kunci bagi pembangunan di Afghanistan agar dapat mencapai potensi penuh;
- (3) Perempuan dan anak perempuan telah menerima dampak besar dari kebijakan yang saat ini diterapkan di Afghanistan;
- (4) Seruan dan dukungan kuat terhadap penghormatan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, terutama hak pendidikan;
- (5) Afghanistan perlu terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perempuan serta menjaga pemenuhan hak-hak dasar mereka;
- (6) Perlu tindakan nyata untuk memperluas peluang dan akses bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan formal di semua tingkatan dan berbagai metode pembelajaran;
- (7) Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dengan dukungan internasional yang kuat dan konkrit untuk mewujudkan sistem pendidikan serta pelatihan inklusif bagi perempuan dan anak perempuan;
- (8) Konferensi ini menyambut baik janji dan pengumuman upaya kolektif konkrit untuk pendidikan perempuan dan anak perempuan Afghanistan, termasuk pendanaan, barang, dan beasiswa, baik dari pemerintah maupun lembaga non-

pemerintah; (9) Konferensi ini mengundang partisipasi dari negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergabung dalam inisiatif kolektif; (10) Komunitas internasional perlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Afghanistan dalam mengembangkan strategi yang kuat dan memastikan penyediaan bantuan internasional yang efektif dan inklusif.

Forum ini diikuti oleh perwakilan 38 negara mitra kerja sama, 4 organisasi internasional, 9 NGO dan bisnis, dan 9 figur akademisi perempuan (Muamar, 2022). Forum besar ini diharapkan dapat membantu kehidupan perempuan-perempuan di Afghanistan dan mempercepat pemulihan kondisi politik disana.

Lebih lanjut lagi, Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memberikan beasiswa *capacity building* kepada kaum muda Afghanistan terutama bagi perempuan (Ulya & Prabowo, 2023). Komitmen ini dibuktikan dengan pelaksanaan International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE) pada tanggal 8 Desember 2022 di Bali. Pertemuan ini berhasil menggalang komitmen internasional, termasuk sektor swasta, untuk memberikan bantuan pendidikan serta kesehatan untuk perempuan di Afghanistan (Tabloid Diplomasi, 2023). Indonesia sendiri memberikan beasiswa kepada 10 sampai 30 orang setiap tahunnya (Universitas Islam Indonesia, 2022). Di samping itu, Kementerian Luar Negeri telah bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dalam menyediakan beasiswa bagi perempuan Afghanistan. Ke depannya, pemerintah masih akan menggandeng instansi pendidikan lain untuk memperluas kesempatan belajar bagi perempuan Afghanistan. Indonesia sangat serius dalam menangani isu ini. Pemerintah kita memahami bahwa Taliban yang saat ini menguasai Afghanistan berambisi mendirikan negara Islam. Maka dari itu, dalam menyinggung isu perempuan, Indonesia juga berusaha memasukan nilai-nilai Islam dalam diplomasi yang dilakukan bersama pemerintah Taliban. Indonesia menggandeng Qatar untuk membuat forum dialog trilateral dengan Afghanistan. Pertemuan dihadiri oleh tiga orang ulama dari Indonesia, lima dari Qatar, dan sebelas dari Afghanistan (Idrus, 2022). Dalam forum tersebut, ulama

Indonesia mengemban tugas untuk mengangkat beberapa isu, di antaranya peran pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, serta perempuan dan pendidikan dalam perspektif Islam dalam memajukan perdamaian (Surya, 2022).

Seorang perempuan Afghanistan yang tengah menempuh pendidikan S2 di Indonesia menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Indonesia. Perempuan tersebut bernama Shayesta Azimi yang sedang berkuliah di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Ia menyampaikan bahwa kesempatan tersebut datang dari beasiswa penuh dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang merupakan hasil kerja sama NU dengan pemerintah Afghanistan. Shayesta menyampaikan keprihatinannya tentang kondisi perempuan Afghanistan:

“Saya sendiri jika ditanya mengenai peluang para perempuan di Afghanistan, sudah pasti saya menjawab 0%. Karena sudah tidak ada peluang sama sekali yang bisa didapatkan oleh para perempuan yang berada di Afghanistan. Kehidupan di Afghanistan memang berjalan normal seperti biasa karena sudah tidak ada lagi perang yang mengancam nyawa masyarakat Afghanistan tapi tetap harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Taliban yaitu perempuan tidak boleh keluar rumah” (Azimi, 2023).

Beasiswa dari pemerintah RI diberikan kepada 23 mahasiswa termasuk Shayesta. Pemerintah Indonesia telah memberikan secercah harapan bagi rakyat Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama untuk kaum perempuan.

1.2.2 Kesehatan

Isu kesehatan Afghanistan juga patut mendapatkan perhatian. Shayesta Azimi menyampaikan kekacauan di bidang kesehatan. Ia berkata:

“...orang-orang taliban yang berada di rumah sakit diangkat menjadi dokter tetapi mereka tidak pernah menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar dokter tersebut, sehingga keadaan di rumah sakit menjadi kacau dan tingkat kesehatan menjadi sangat rendah” (Azimi, 2023).

Kemerosotan kesehatan ini sangat merugikan masyarakat. Bahkan tidak jarang hingga mengancam keselamatan perempuan dan anak-anak. Terlebih lagi, sejak Taliban berkuasa,

perempuan hanya dapat diperiksa oleh tenaga medis perempuan. Di sisi lain, Taliban turut membatasi perempuan dalam menjalankan aktivitas, termasuk bagi para perempuan yang berprofesi sebagai paramedis dan dokter.

Maka dari itu, Indonesia memberikan bantuan beragam bagi kesehatan perempuan di Afghanistan. Salah satunya melalui sosialisas ataupun penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui bantuan peningkatan kapasitas penanganan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (Padmaratri, 2022). Menurut ketua BKKBN RI, Hasto Wardoyo, masyarakat Afghanistan masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap kesehatan ibu dan anak. Sedangkan, perempuan merupakan garda terdepan dalam membentuk generasi muda dan membangun masa depan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memasok obat-obatan untuk Afghanistan. Untuk merespon terjadinya *outbreak* polio di Afghanistan, Indonesia akan memberikan 10 juta vaksin polio untuk rakyat Afghanistan (Ulya & Prabowo, 2023). Proses pemberian vaksin ini dikoordinir melalui beberapa pihak, seperti WHO dan UNICEF.

1.3 Komitmen Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan dalam Perspektif Konstruktivisme Berbasis Norma

Dalam membantu negara-negara berkonflik, Pemerintah Indonesia sangat teliti menyorot pada sektor-sektor termarginal yang memang sangat perlu untuk dipulihkan. Untuk kasus di Afghanistan sendiri, kita telah banyak membicarakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberdayakan kaum perempuan. Fenomena ini dapat ditinjau dari sudut pandang konstruktivisme berbasis norma. Ada dua norma internasional yang melandasi tindakan Indonesia, yakni menjaga perdamaian dan kesetaraan gender. Kemudian, ada satu norma domestik yakni norma gotong-royong.

1.3.1 Menjaga Perdamaian

Perdamaian telah menjadi tujuan dari interaksi antara negara-negara di dunia. Perdamaian mulai banyak dibicarakan sejak meledaknya Perang Dunia Pertama. Bencana besar yang disebabkan oleh peperangan ini memicu banyak politisi dan peneliti untuk dapat mengurai pemicu peperangan. Dalam studi Hubungan Internasional, konsepsi tentang perdamaian dimulai sejak “*great debate*” pertama. Kala itu, kaum idealis dan liberalis menentang pandangan realis yang menganggap negara-negara saling menaruh curiga. Sehingga, perdamaian hampir tidak mungkin terwujud. Kemudian, idealis dan liberalis mencetuskan serangkaian “formula” untuk mempercepat perdamaian. Agenda-agenda perdamaian ini muncul sebagai reaksi terhadap konseptualisasi perdamaian realis yang suram (Richmond, 2008, hal. 22). Selain itu, wacana yang dicetuskan oleh idealis dan liberalis juga dilandasi oleh faktor yang lebih humanistik.

Konsepsi soal perdamaian kemudian meluas menjadi sebuah norma di tataran internasional. Dimana, negara-negara telah sepakat untuk menjaga perdamaian dunia. Sehingga, menjaga perdamaian menjadi sebuah tindakan yang sangat dianjurkan karena dianggap baik oleh para aktor internasional. Hal ini sejalan dengan konstruktivisme berbasis norma yang meyakini bahwa tindakan suatu negara dapat dilandasi oleh hati nurani atau oleh baik dan buruknya suatu hal.

Norma menjaga perdamaian ini juga tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia. Artinya, Indonesia sepakat bahwa perdamaian perlu diupayakan dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari hal tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam konstitusi kemudian menjadi landasan bagi politik luar negeri RI. Begitupun logika yang digunakan ketika pemerintah kita memutuskan untuk membantu perempuan-perempuan di Afghanistan. Kepedulian terhadap rakyat Afghanistan yang berada pada kondisi terpuruk dan krisis akibat perang dan konflik telah menggerakkan Indonesia untuk membantu memulihkan hak-hak perempuan dan anak di sana (Rachman, 2023).

Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa perdamaian telah menjadi norma universal yang ada di dunia. Semua negara, bahkan semua aktor, di tataran internasional sepakat bahwa perdamaian adalah tujuan akhir. Maka dari itu, para aktor internasional bersama-sama memformulasikan rumus-rumus mencapai perdamaian, termasuk Indonesia. Banyak sekali cara yang dapat ditempuh dalam mencapai perdamaian tersebut. Dengan kata lain, perdamaian tidak dapat dipukul rata pada setiap wilayah atau setiap negara. Oleh sebab itu, perdamaian dapat dibagi menjadi dua, yakni perdamaian positif dan perdamaian negatif.

Perdamaian positif adalah perdamaian abadi yang dibangun dengan investasi berkelanjutan dalam aspek pembangunan dan institusi ekonomi suatu negara serta sikap masyarakat yang turut mendorong perdamaian (Positive Peace Organization, 2018). Kondisi ini membuat masyarakat lebih tahan dari guncangan politik sehingga tidak terjerumus ke dalam konflik, terutama yang menuju peperangan.

Sedangkan, perdamaian negatif adalah kondisi tidak adanya perang dan kekerasan serta belum tercipta kecenderungan masyarakat untuk menjadi stabil dan harmoni (Positive Peace Organization, 2018). Perdamaian negatif sering kali terjadi di negara-negara berkonflik dan disokong oleh aktor internasional di luar pemerintah negara tersebut. Ketidakmampuan pemerintah domestik untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya akan membuat dunia internasional mengambil alih tanggung jawab tersebut. Para peneliti hubungan internasional generasi pertama telah bekerja atas dasar bahwa versi perdamaian yang ambisius (perdamaian positif) tidak dapat dicapai dalam konflik-konflik tertentu (Richmond, 2008, hal. 101).

Indonesia sadar betul akan situasi domestik di Afghanistan. Alih-alih memaksakan kondisi damai secara penuh, yang dilakukan Indonesia justru berbeda. Jika perdamaian positif belum mampu tercapai, setidaknya perdamaian negatif perlu terus didorong dan dijaga. Perdamaian negatif inilah yang dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang menyasar

pada kelompok-kelompok kecil tidak dapat diabaikan. Kehadiran relawan Indonesia, berdirinya sekolah dan rumah sakit Indonesia di Afghanistan, serta hal-hal lain dapat menjadi bukti terlaksananya upaya mewujudkan perdamaian negatif.

Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun dalam melaksanakan pemberdayaan ini. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri menegaskan bahwa kepentingan Indonesia yang utama adalah pengamalan amanat konstitusi, yakni: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." (Mulyana, 2023). Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa ada keselarasan antara norma internasional dengan konstitusi negara kita. Sejauh ini, kedua hal tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah dan bahkan masih akan dikembangkan lebih jauh lagi.

1.3.2 Kesetaraan Gender

Perjuangan para perempuan dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak telah mengalami perjalanan panjang. Peperangan, kolonialisme, dan serangkaian sejarah kelam telah membuat para perempuan berusaha untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pasca Perang Dunia Pertama, banyak istri yang kehilangan suaminya karena gugur dalam berperang. Di satu sisi, mereka kehilangan sumber penghasilan dan harus mencari pekerjaan demi tetap menghidupi keluarga mereka. Di sisi lain, regulasi di Eropa saat itu tidak menyulitkan upaya perempuan dalam mencari pekerjaan. Hanya beberapa sektor yang dapat menerima pekerja wanita. Sedangkan, jumlah ini tidak sebanding dengan banyaknya perempuan yang memerlukan pekerjaan untuk menyambung hidup. Di Indonesia sendiri, mengalami kondisi yang masih mirip dengan kondisi di Eropa. Dimana, ruang lingkup perempuan sangat dibatasi oleh penjajah. Pada akhirnya, kebijakan dari bangsa penjajah membentuk masyarakat yang patriarki dan membuat perempuan termarginalkan. Pergerakan perempuan pun kian berkembang. Salah satu yang paling terkenal adalah perjuangan Ibu Kartini. Emansipasi wanita yang dilakukan oleh Kartini merupakan peristiwa bersejarah dalam perkembangan perempuan Indonesia.

Kartini telah mengembalikan hak-hak perempuan untuk menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesetaraan gender pun semakin banyak digaungkan di seluruh dunia. Masyarakat dunia mulai menyadari bahwa banyak perempuan yang mengalami kondisi sulit di negaranya. Pada akhirnya, muncul istilah kesetaraan gender yang dipromosikan oleh aktor-aktor non negara. Di era modern, istilah ini banyak diinternasionalisasi oleh organisasi dunia seperti PBB. Hingga akhirnya negara-negara memiliki kesadaran untuk memperhatikan kondisi perempuan di negara mereka masing-masing.

Norma kesetaraan gender turut berkembang di Indonesia. Norma internasional yang masuk ke dalam sebuah negara pasti mengalami dinamika yang berbeda-beda. Norma-norma ini tidak serta merta stabil setelah dikonstruksi oleh sebuah negara. Isi norma mungkin perlu direvisi sebagai upaya untuk memperluas makna atau sebagai akibat dari pergeseran norma-norma yang lebih luas (Krook & True, 2010, hal. 117). Namun, kesadaran akan pentingnya penyetaraan hak-hak perempuan di Indonesia membuat norma kesetaraan gender ini cukup mudah diterima oleh bangsa kita.

Pemerintah Indonesia pun mulai mengelaborasi kesetaraan gender ke dalam kebijakan luar negeri. Salah satunya kebijakan yang menysasar pada isu pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa norma kesetaraan gender memiliki dua mega-strategi. Pertama, pengambilan keputusan dengan gender yang berimbang. Tujuannya untuk menyerukan kesetaraan partisipasi perempuan sebagai pembuat kebijakan. Kedua, pengarusutamaan gender yang bertujuan menyoroti perlunya perspektif gender dalam semua tahap pembuatan kebijakan (Krook & True, 2010, hal. 112). Kebijakan luar negeri di era Jokowi sendiri melakukan pengarus utamaan gender. Hal ini tertuang secara rinci pada Permenlu No. 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Aturan ini kemudian dijadikan pedoman formal dalam berbagai

program dan kebijakan luar negeri yang diimplementasikan oleh Perwakilan RI di Kabul berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Afghanistan (Rachman, 2023).

1.3.3 Gotong Royong

Banyak aktor internasional yang telah terlibat untuk menyelesaikan masalah di Afghanistan. Namun, Indonesia tetap turun tangan membantu memulihkan kondisi disana. Mulai dari upaya advokasi hingga pemberian bantuan secara langsung telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, kita tahu bahwa anggaran untuk memberikan bantuan-bantuan ini tidaklah sedikit. Pernyataan pejabat negara juga selalu menegaskan bahwa tindakan Indonesia terhadap masyarakat Afghanistan didasari rasa kemanusiaan. Ini artinya, tidak ada keuntungan yang diambil oleh negara kita ketika membantu Afghanistan. Lantas mengapa Indonesia tetap terlibat dalam proses pemulihan kondisi disana meskipun telah banyak aktor yang memperjuangkan hal tersebut?

Tindakan ini dipengaruhi oleh norma gotong royong yang sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia. Gotong royong dapat kita maknai sebagai saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Norma ini telah berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan. Di era modern seperti sekarang, kebijakan-kebijakan pemerintah juga sering kali mengedepankan gotong royong. Norma tersebut masih sangat relevan dan melekat pada masyarakat dan pemerintah Indonesia sendiri.

Lebih lanjut lagi, norma gotong royong juga diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Inilah yang mendasari tindakan pemerintah Indonesia terhadap pemberdayaan perempuan dan anak di Afghanistan. Indonesia tidak hanya bertindak secara mandiri, tetapi juga mendukung aktor lain dalam misi di Afghanistan. Misalnya, Indonesia terus mendorong operasional UNAMA untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Afghanistan (Mulyana, 2023). Kemudian juga Indonesia yang melakukan upaya advokasi melalui CEDAW. Dilanjut dengan pengiriman pasukan perdamaian ke Afghanistan melalui PBB.

Tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama bilateral untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Salah satu negara yang konsisten bersama Indonesia adalah Qatar. Kedua negara ini sepakat untuk membantu perempuan Afghanistan dengan memberikan sejumlah sokongan pendidikan. Komitmen ini juga disahkan dalam letter of intent terkait kesediaan kedua negara menyediakan beasiswa dan kapasitas pembangunan bagi semua, terutama bagi perempuan (Cindyara, 2022).

Selanjutnya, Indonesia juga membantu Afghanistan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pemerintah memasukan unsur keagamaan untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Taliban. OKI mencoba membuka ratusan juta dolar aset Afghanistan yang dibekukan Barat dan komunitas global guna mengatasi krisis kemanusiaan yang mulai muncul. Indonesia bersama OKI terus mendesak pemerintah Taliban agar bertanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak perempuan, anak, pemuda, orang tua, serta orang berkebutuhan khusus (Oktarianisa, 2021). Indonesia mengirimkan ulama dan akademisi keagamaan untuk melakukan perundingan dengan Taliban. Negara kita bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut. Ada beberapa negara mayoritas muslim yang turut mengirimkan ulama ke Kabul, seperti Turki, Republik Guinea, Yordania, Pakistan, Nigeria, dan Sudan (Anardianto, 2022). Sudah banyak sekali aktor yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

Tindakan Indonesia terhadap Afghanistan ini berlandaskan norma gotong-royong yang selama ini telah dipegang teguh oleh bangsa kita. Hal ini juga dipertegas dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024. Visi yang ingin dicapai adalah “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). Artinya, gotong-royong sangat relevan bahkan ketika diimplementasikan oleh Pemerintah RI di ranah internasional. Indonesia juga justru menjadi pioner bagi kerja sama gabungan dalam memberika pemberdayaan bagi kaum perempuan di Afghanistan.